**PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI)**

**Nur Said, Iskandar Wibawa**

Nursaiddias57@gmail.com iskandar.wibawa@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

 ***ABTRACT***

*The purpose of this research is to know the community in hamlet Jongso Wotan village Sukolilo district Pati regency who are still littering. And also to know enforcement village regulation number 7 of 2020 the clean environment by the village government wotan village Sukolilo district Pati regency. This research uses the approach non - doctrinal or empirical juridical or sociological, to describe the condition seen in the fieid as is. In data collection writer or researcher using qualitative descriptive method through observation, interview and documentation especially interview depth with informant the selected with use Snow Ball or in a chain in look for information in inteviewing people so information has been considered sufficient.*

*The results of this research later can show that enforcement implementation village regulation number 7 of 2020 the clean environment by the village government Wotan village Sukolilo district Pati regency, can’t be realized maximally because there are some factors behind it that is factor law founder, factor facilities or facilities, factor public and culture.*

***Keywords* : *Enforcement village regulation number 7 of 2020 the clean environment***

**ABSTRAK**

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengetahui Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan pendekantan Non Doktinal atau yuridis Empiris atau / Sosiologis, untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Dalam pengumpulan data ini, Penulis / Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama wawancara yang mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan *Snow Ball* atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup.

Hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.

**Kunci** : **Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Lingkungan Hidup**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Hukum dan norma sosial adalah suatu hal yang merupakan perilaku yang telah melembaga jika ditinjau dari aspek orentasi nilai dari standar persenolalitasnya yang telah ada sebagai penyesuaian antara sistem kepribadian dengan sistem sosial dan juga kesusaian

dengan antara internalitas dengan suatu tindakan.

 Bentuk paradigma fungsional struktur yang telah ada keteraturan pada setiap elemen, saling terkait, menyatu dan ada dalam keseimbangan. Hukum juga dipandang perlu sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demontrasi sosial terhadap prinsip - prinsip kebenaran, keadilan dan berkemanusiaan dengan universalitas yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perkembangan dan perubahan zaman. [[1]](#footnote-1) Pada dasarnya tujuan hukum yang demokratis itu tidak hanya tercapainya sebuah keadilan saja, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum itu juga harus dapat berfungsi untuk menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat atau masyarakat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan serta bukan untuk menyengsarakan. [[2]](#footnote-2)

 Usaha untuk menegakkan hukum terutama hukum kebersihan lingkungan hidup itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga harus seluruh anggota masyarakat itu harus ikut serta, bahkan harus dimulai dari rumah tangga dan diri sendiri. [[3]](#footnote-3)

Faktor lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak oleh manusia itu sendiri, karena saling keterkaitan diantara keduanya.[[4]](#footnote-4) Sebagiamana yang tercantum dalam Pasal 28 A UUD 1945, yaitu bahwa setiap orang pada dasarnya berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya.

Syari’at agama islam juga telah mengajarkan dan / atau menganjurkan megenai kebersihan lingkungan yang mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, pekerangan dan jalan. Sebagaimana dengan hadits Nabi Muhammad SAW yaitu bahwa kebersihan adalah sebagian dari pada iman. Kondisi lingkungan yang bersih sangat mendukung kenyamanan dan menarik, sebaliknya juga bahwa tempat yang kotor akan menjadikan kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan tidak menarik.

Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 07 Tahun 2020 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, telah mengalami problem dan / atau permasalahan dalam suatu masyarakat, yaitu khususnya pada masyarakat di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamtan Sukolilo Kabupaten Pati, yang masih melakukan penyimpangan yaitu masih banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah suatu kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap mahluk hidup yang disebabkan oleh ulah manusia.[[5]](#footnote-5) Wujud dampak dari pencemaran yang terjdi pada lingkungan hidup tersebut adalah pencemaran udara yaitu menimbulkan bau yang tidak enak dan merusak pemandangan yang ada. Padahal Pemerintah Desa khusunya di Dukuh Jongso juga sudah menyediakan tempat dan / atau lahan khusus untuk tempat pembuangan sampah bagi masyarakatnya.

Dukuh Jongso merupakan bagian dari Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang memiliki keunikan dan / atau keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan pedukuhan - pedukuhan yang lain yang berada di Desa Wotan lainya yaitu sebuah pedukuhan yang benar - benar terisolasi (terpencil). Dukuh Jongso ini terpisah dengan Desa Wotan sepanjang delapan kilo meter dari Desa Wotan, hal ini terpisah dengan areal persawahan yang begitu luas. Sementara itu bagian barat, utara dan selatan Dukuh Jongso sudah masuk wilayah kudus.

Selain itu Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, bila dilihat dari jumlah penduduknya cukup banyak yaitu ada 386 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 8 RT dan 2 RW, juga terdapat masjid yang sangat megah yang pembangunannya mencapai kurang lebih 1,5 miliyar yang kemudian disebelah masjid tersebut juga terdapat sekolah Pendidikan khusus bahasa korea. Kehidupan warga masyarakat Dukuh Jongso masih jauh dari kesan modern, mata pencaharian utamanya penduduk disana adalah rata - rata pertanian yang walaupun ada sebagaian yang lain seperti peternakan, perikanan dan buruh Pabrik dan perantauan.

Adanya uraian tersebut diatas, Peneliti / Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Problem - Problem dan / atau masalah - masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan masalah Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Lingkungan Hidup di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

1. **Rumusan Masalah**
2. Mengapa warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih membuang sampah sembarangan ?
3. Bagaimana Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ?

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Penegakan Hukum**

 Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan atau perbuatan menegakan.[[6]](#footnote-6) Jadi makna penegakan adalah proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, aturan, standar dan norma - norma sosial. Penegakan yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Desa.

Istilah Penegakan Hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu ’’*Force*’’(memaksa) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Menurut A. Hamzah dalam bukunya Moh. Fadli menyatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen admistratif, kepidanaan dan / atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu.[[7]](#footnote-7) Menurut Sri Sulistyawati dalam jurnalnya mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses pemungsian norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[[8]](#footnote-8)

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan penindakan hukum, yaitu antara lain : [[9]](#footnote-9)

1. Teguran untuk menghentikan pelanggaran;
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
3. Penyisihan atau pengecualian (Pencabutan hak - hak tertentu);
4. Pengenaan sanksi badan (pidana, penjara dan pidana mati).

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. [[10]](#footnote-10) Maksud dari keinginan - keinginan hukum adalah pikiran - pikiran badan pembuat undang - undang yang dirumuskan dalam sebuah peraturan - peraturan hukum. Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum adalah sebagai berikut: [[11]](#footnote-11)

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang - undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Penegakan Hukun.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

 Salah satu cara dan / atau upaya untuk melakukan penegakan hukum itu juga dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi admistrasi. [[12]](#footnote-12)

 Sistem penegakan hukum itu memiliki mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan - aturan yang secara adil, pasti dan tegas serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum. [[13]](#footnote-13)

 Menurut teorinya *Gustav Radbruch* yang ditulis dalam bukunya Satjipto Raharjo bahwa ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu: Keadilan hokum, Kepastian hukum,dan Kemanfaatan hukum. [[14]](#footnote-14)

 Menurut teorinya *Lawrence M. Friedman* ada beberapa faktor yang dapat mentukan proses penegakan hukum yaitu : [[15]](#footnote-15)

1. Komponen substansi yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
2. Struktur yaitu pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan - ketentuan formalnya.
3. Kultur yaitu menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumya) terhadap hukum dan sistem hukum.

 Bahwa yang menjadi aparat penegak hukum Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 adalah Aparat / Perangkat Desa (Kepala Desa, Kepala Dukuh) dan juga melibatkan Aparat Kepolisian yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (*Babinkamtibmas*) dan Bintara Pembina Desa (*Babinsa*) serta Badan Permusyaratan Desa (BPD) selaku Pengawas Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

1. **Peraturan Desa (Perdes)**

 Peraturan Desa (Perdes) adalah jenis peraturan perundang - undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan organ Pemerintah Desa, atau sebuah peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. [[16]](#footnote-16)

 Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang - undang tentang Desa Nomor: 6 tahun 2014 menegaskan bahwa:

 “ Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”

 Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti : Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, Terganggunya akses terhadap pelayanan public dan Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

 Mengenai pembentukan peraturan perundang - undangan ada beberapa jenis peraturan perundang - undangan yang disusun menurut hierarkinya yaitu sebagaimana yang tertera dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011, yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) joncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“ Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 8 ayat (1) berbunyi :

 “ Jenis peraturan perundang - undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang - undang atau Pemerintah atas perintah undang - undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ”.

Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

 “Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaanya dan mempuyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenanganya.”

 Peraturan Desa (Perdes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tentang Kebersihan Lingkungan Hidup Nomor : 07 Tahun 2020,yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Dalam Bab IV Pasal 4 huruf (c)

 “ Bahwa setiap penduduk dan penghuni diwilayah Desa Wotan berkewajiban untuk membuang sampah harus pada tempat sampah atau tempat yang ditentukan”.

 Kemudian atau selanjutnya dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Setiap orang baik penduduk Desa Wotan atau bukan dilarang mengotori membuang sampah disembarang tempat diwilayah Desa Wotan;
2. Pemerintah Desa Wotan akan memasang tanda larangan membuang sampah ditempat - tempat yang dianggap strategis dan akan menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan kebutuhan;
3. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi admistrasi, atau sanksi yang lain yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar sebagaimana Pada Ayat (1) dan (2) tersebut diatas;

 Mengenai ketentuan sanksi dalam Peraturan Desa ini telah mengacu dan / atau merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 7 tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1, 2, 3 dan 4) berbunyi bahwa :

* 1. Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan sampah kedalam wilayah Daerah tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
	2. Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah dijalan umum, tempat umum, perairan umum dan / atau badan air penerima, pantai dan laut, selokan parit, taman dan halaman orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
	3. Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah yang tidak sesui dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
	4. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 yaitu tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa :

 Ayat (2) berbunyi :

 “ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

 Berdasarkan juga dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 yaitu tentang peraturan pelaksana Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

 “ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainya. Perangkat Desa lainya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014, terdiri atas:

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana teknis lapangan;
3. Unsur kewilayahan.

**C. Kebersihan Lingkungan Hidup** Kebersihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bahu.[[17]](#footnote-17) Kebersihan lingkungan dalam hal ini adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja dan berbagai sarana umum.

 Menurut jumarsa yang ditulis dalam jurnalnya bahwa kebersihan lingkungan adalah : [[18]](#footnote-18)

 “ Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, bersih, dan sejuk sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit.”

 Pengertian lingkungan hidup dan ruang lingkupnya secara lengkap dijelaskan didalam Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Bab I dan tertera didalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

 “ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan mahluk hidup, termasuk didalamya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta ma dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainya.”

 Kebersihan Lingkungan Hidup adalah lingkungan yang bersih dan sehat sehingga tidak mudah untuk terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber dan lainya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan nyaman. [[19]](#footnote-19)

 Pencemaran lingkungan hidup adalah merupakan suatu kondisi lingkungan yang memberikan dampak pengaruh negatif terhadap mahluk hidup yang disebabkan oleh ulah manusia. Dalam ketentuan Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah :

 “ Masuk atau dimasukkanya mahluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

 Sampah dapat dibersihkan dengan cara - cara sebagai berikut : [[20]](#footnote-20)

a. Membersihkan sampah organik

Sampah organik adalah samapah yang dapat dimakan oleh zat - zat organik didalam tanah, maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam - dalam sampah organik tersebut, contoh sampah organik :

1. Daun - daun tumbuhan
2. Ranting - ranting tumbuhan
3. Akar - akar tumbuhan

b. Membersihkan sampah non organik

Sampah non organik adalah sampah yang tidak dapat hancur (dimakan oleh zat organik) dengan sendirinya, maka sampah non organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya.

 **METODE PENELITIAN**

Metode penilitian ini melaui Pendekatan Non Doktrinal atau Yuridis Empiris / Sosiologis. Dalam bahasa inggris disebut dengan *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Empirsch juridich anderzoek,* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. [[21]](#footnote-21)

Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang - undangan dan norma - norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. kemudian yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan peraturan perundang - undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada atau untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.[[22]](#footnote-22) Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang tergolong sebagai *Field research* (Penilitan lapangan) yaitu penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi respoden. Lokasi Penelitian ini berlokasi di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Jenis datanya adalah Data Primer melalui Pengamatan (*Observasi*) dan Wawancara menggunakan *Snow Balls* atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Wotan, Kepala Dusun (Dukuh) Jongso, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga), Pelaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Data sekunder ini berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data sekunder ini terdiri dari Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat) seperti perundang - undangan yang meliputi : Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembantukan Peraturan Perundang - Undangan, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 tahun 2010 Tentang Sampah, Peraturan Desa Wotan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Lingkungan Hidup. Kemudian Bahan hukum sekunder (bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sumber referensi yang terkait baik berupa buku atau dokumen, jurnal ilmiah, pendapat para ahli dan artikel - artikel yang terkait). Dan Bahan hukum tersier (bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder). Data tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris serta Ensiklopedi. Pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis / Peneliti adalah mengacu dan / atau bersandar pada data primer dan data sekunder. Data primer melalui *observasi* (pengamatan) dan Wawancara (*Interview*) yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder ini melalui metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian Kualitatif. Metode Analisis Data secara *Deskriptif Kualitatif*. Deskriptif maksudnya adalah bahwa Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek atau obyek penelitian, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Kualitatif adalah suatu cara analisis Peneliti yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lesan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, atau suatu analisis data yang pengambilanya dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari kualitas kinerjanya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori - teori dan peraturan - peraturan perundang - undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang ada dilapangan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Kebiasaan Masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Membuang Sampah
2. Deskripsi ( Gambaran ) Umum Lokasi Penelitian

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Wotan dan Kepala Dukuh Jongso bahwa Dukuh Jongso merupakan bagian dari Desa Wotan. Desa Wotan sendiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Desa Wotan terdiri dari 46 RT, 11 RW, dan 10 Pedukuhan yang terdri dari Dukuh Wotan Krajan, Karang Turi, Sidorejo, Jongso, Sarimulyo, Pandaen, Sukunan, Demangan, Jangkang, dan Karangayar. Daerah Desa tersebut berbatasan langsung dengan desa kedung Winong disebelah selatan perbatsan dengan Desa Baleadi dan Kabupaten Kudus di sebelah barat, perbatasan dengan Kabupaten Kudus disebelah utara, dan disebelah timur perbatasan dengan Desa Baturejo. Desa Wotan memiliki luas wilayah mencapai 2113 Ha, dan sebanyak 1756 Ha, merupakan lahan Sawah. Tidak heran jika Desa Wotan disebut - disebut sebagai Desa dengan lahan pertanian terluas se - Jawa Tengah bahkan se- Indonesia.

 Dukuh Jongso, Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah benar - benar terisolasi (terpencil). Dukuh ini terpisah dengan Desa Wotan sepanjang delapan kilometer. Dari Wotan, Dukuh Jongso dengan kurang lebih 386 (Kartu Keluarga) ini terpisah dengan areal persawahan yang begitu luas. Sementara itu, bagian barat, selatan dan utara Dukuh Jongso sudah masuk wilayah Kudus. Untuk bertandang ke pusat pemerintahan Kabupaten Pati, warga masyarakat Dukuh Jongso harus menempuh perjalalan melalui Kecamatan Sukolilo hingga 50 kilometer. Kadang, warga lebih memilih lewat Kudus untuk menuju Pati ketimbang lewat Sukolilo. Praktis semua kegiatan warga masyarakat Dukuh Jongso justru lebih banyak dihabiskan di Kudus ketimbang di Pati. Mulai dari sekolah, periksa kesehatan, belanja dipasar baik pasar swalayan maupun tradisional, kerja hingga keluar untuk sekedar mencari hiburan. Kehidupan warga masyarakat Dukuh Jongso masih jauh dari kesan modern. Mata pencaharian utamanya penduduk disana adalah rata - rata pertanian. Munculnya Peraturan Desa Nomor : 07 tahun 2020 tentang keberbersihan lingkungan hidup di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, adalah berawal dari inisiatif dari Kepala Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang bertujuan agar masyarakat Desa Wotan bisa tertib terutama dalam masalah menjaga kebersihan lingkungan. [[23]](#footnote-23)

 Gambaran objek penelitian pada warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati antara lain :

Gambar Peta Desa Wotan Dan Denah Lokasi Dukuh Jongso

 

Kondisi Ekonomi Masyarakat Dukuh Jongso Sebagian besar warga masyarakat penduduk di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, adalah telah mengandalkan perekonomianya dibidang pertanian. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Dukuh Jongso dapat dilihat dari jumlah Penduduk dan tingkat Pendidikan di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tercatat hingga saat ini sebanyak 1.488 jiwa, yang terdiri dari 660 laki - laki dan 828 penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut umur dikelompokkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Klompok Umur | Laki –laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0 – 4 | 25 | 30 | 55 |
| 2 | 5 – 9 | 40 | 50 | 90 |
| 3 | 10 – 14 | 55 | 65 | 120 |
| 4 | 15 – 24 | 75 | 90 | 165 |
| 5 | 25 – 34 | 85 | 100 | 185 |
| 6 | 35 – 44 | 100 | 135 | 235 |
| 7 | 45 – 54 | 115 | 125 | 240 |
| 8 | 55 – 64 | 90 | 105 | 195 |
| 9 | 65 + | 75 | 128 | 203 |
|  | Jumlah | 660 | 828 | 1.488 |

 Kemudian untuk tingkat Pendidikan pada Masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Belum Sekolah | 45 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 227 |
| 3 | SD – SLTP | 550 |
| 4 | SLTA | 539 |
| 5 | Akedemi / Perguruan Tinggi | 110 |
| 6 | Buta Huruf | 17 |
|  | Jumlah | 1.488 |

 Berdasarkan tabel tersebur diatas, bila dilihat dari sumber daya manusia di Dukuh Jongso Desa Wotan sudah lamayan terdidik dengan 539 lulusan SLTA (Lulusan Lanjutan Tingkat Atas) dan 110 lulusan Akademi / Perguruan Tinggi, namun tetap yang mendominasi adalah lulusan SD (Sekolah Dasar ) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat dan untuk agamanya mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dengan sejumlah sebesar 1485 jiwa, dan 3 jiwa / orang yang beragama non Muslim. Untuk tempat peribadatan di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati hingga saat ini ada 1 (Satu) Masjid dan 3 (Tiga) Musholla.

1. Kebiasaan Masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Membuang Sampah.

 Manusia bermasyarakat, itu hidup didalam apa yang dinamakan situasi sosial dan situasi alam. Situasi sosial merupakan keadaan dimana terdapat hubungan timbal balik antar manusia sebagai mahluk sosial. Adanya situasi tersebut, telah dapat dikembalikan pada paling sedikit tiga faktor yaitu : Naluri manusia untuk hidup bersama dengan manusia., Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya.[[24]](#footnote-24)

 Akibat dari pembuangan sampah sembarangan adalah timbulnya pencemaran udara akibat meningkatnya konsentrasi gas serta timbulnya bau yang tidak enak dan rusaknya pemandangan baik itu yang ditimbulkan pada tahap operasi penimbunan dan pemadatan sampah, maupun setelah selesainya operasi. Selain itu juga dari segi kesehatan, jika penimbunan sampah tidak dilakukan secara baik akan memungkinkan munculnya faktor penyakit seperti lalat, tikus, dan serangga lainya, serta meningkatnya jumlah kasus penderita infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan penyakit kulit akibat asap dari pembakaran sampah.[[25]](#footnote-25)

 Kebiasaan masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dalam membuang sampah itu dipengaruhi oleh adanya faktor kesadaran hukum.

 Faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang *pertama* adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. *Kedua* tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. *Ketiga* adalah pengakuan terhadap sebuah ketentaun - ketentaun hukum. *Keempat* adalah pentataan atau kepetuhan terhadap ketentuan - ketentuan hukum. *Kelima* adalah penghargaan terhadap ketentuan - ketentuan hukum. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan - ketentuan hukum yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum itu diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai - nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum kerena kepentingan mereka terjamin pemenuhanya.[[26]](#footnote-26)

Gambar kondisi pembuangan sampah sembarangan



 Teknik pembuangan sampah dilakukan oleh para pelaku adalah ketika para pelaku mau berangkat bekerja, sekitar jam 05.00 Wib Pagi (Fajar) yaitu dengan membawa sekantong plastik yang isinya sampah yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian dibuang di pinggir jalan dekat sungai yang tepatnya di jalan utama Pati menuju ke Kudus.

Gambar pelaku yang melakukan pembuangan sampah sembarangan



 Rasa kesadaran diri pada penduduk dan / atau warga masyarakat di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, berkurang karena adanya faktor budaya atau kebiasaan yang kurang baik.

 Berdasarkan Keterangan dari Nara Sumber Pemerintah Dukuh Jongso yaitu Kepala Dusun / Kepala Dukuh Jongso dan Badan permusyawaratan Desa Wotan bahwa ia sudah pernah melakukan teguran dan bahkan telah melakukan pemanggilan bagi para pelaku pembuang sampah sembarangan yang telah dihadiri oleh Kepala Desa Wotan, BPD (Badan Permusyawatan Desa) setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Aparat Kopolisian yaitu Babinkamtibmas dan Koramil yaitu Babinsa dengan sistem tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk diberi peringatan dan penyuluhan agar tidak lagi melakukan pembuangan sampah secara liar dan juga agar membuang sampah dilakukan ditempat pembuangan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yaitu Kepala Desa Wotan dan khususnya Kepala Dukuh Jongso beserta Perangkatnya akan tetap melalukan Pengawasan (*Preventif)* secara intensifterhadap masyarakat yang masih bandel tersebut, dengan melalui pendekatan - pendekatan yang baik agar bisa tumbuh rasa kesadaran diri sehingga tidak merugikan masyarakat yang lain. [[27]](#footnote-27) Untuk meningkatkan mutu lingkungan, maka pengetahuan lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena melalui pengetahuan manusia makin memahami dan sadar akan bahaya limbah rumah tangga terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia.

1. Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang K.ebersihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

 Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah merupakan penegakan nilai - nilai kebenaran dan keadilan, yang berarti bahwa penegak hukum dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menegakan nilai- nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung didalam hukum atau aturan yang dibuatnya.

 Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Pemeritahan yang baik (*Good Governance*) haya bisa dicapai apabila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada konsep *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik yaitu adalah sebagai beriku:[[28]](#footnote-28)

1. Pemerintah melaksanakan kewenanganya berdasarkan supremasi hukum.
2. Pemerintah menjamin kepastian hukum.
3. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu meyerap aspirasi masyarakat.
4. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
5. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya indenpedensi peradilan.

 Berdasarkan keterangan dari Nara Sumber Kepala Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Sejauh ini memang Pemerintah Desa Wotan khususnya Kepala Dukuh Jongso beserta perangkatnya dalam melakukan penegakan hukumya masih dalam tahap atau proses *Preventif* yaitu dengan cara melalui pengawasan dengan tujuan untuk membangun kesadaran diri masyarakat yang ada di didalam masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang berkaitan dengan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup yang ada dimasyarakat.

 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 yang berkaitan tentang kebersihan lingkungan yang ada di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini, belum bisa dilaksanakan dengan secara maksimal karena masih terbentur dengan keadaan atau situasi dan kondisi yang ada, yaitu karena adanya wabah penyakit covid 19 dan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pati, dan juga karena masih kurangnya sarana dan prasana yang ada di Desa Wotan khususnya pada warga masyarakat yang berada di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang masih menunggu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pati yang berupa bantuan mobil pengangkutan sampah.

 Menurut teorinya Soerjono Soekanto mengemukan bahwa penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik maka dibutuhkan keserasian dalam hubungan lima faktor yaitu :

1. Faktor hukum hukumnya itu sediri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak - pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

 Begitu juga menurut teorinya *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum itu tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen yaitu :

1. Struktur hukum (*Sturcture of law*) yaitu dalam pelaksanaan hukumnya.
2. Subtansi hukum (*Substance of the law*) yaitu norma atau atau aturan dan pola perilku orang.
3. Budaya hukum (l*egal culture*) yaitu kebiasan masyarakat.

 Apabila faktor - faktor penegakan hukum menurut teorinya Soerjono Soekanto dihubungkan dengan Sistem hukum menurut teorinya *Lawrence M. Friedman* tersebut diatas, maka ada kaitan erat diantara keduanya yang dapat digambarkan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Teori Soerjono Soekanto : Faktor - faktor penegakan hokum | Teori Lawrence M. Friedman: Sistem hukum |
| Hukum | Subtansi hukum |
| Penegak hukum | Struktur hukum |
| Sarana atau fasilitas |
| Kesadaran hukum masyarakat | Budaya hukum  |
| Budaya hukum |

 Jika dikaji lebih lanjut atau secara mendalam ada beberapa faktor yang menyebabkan dan / atau yang mempengaruhi Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati itu, belum bisa berjalan sebagaimana mestinya antara lain karena :

1. Faktor Penegak Hukum

 Yaitu Karena masih terbentur oleh keadaan situasi dan kondisi yang ada yaitu adanya penyakit Covid 19 dan pemberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Para penegak hukum dalam Peraturan Desa ini yaitu Kepala Desa , Kepala Dukuh, Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) dan Babinsa ( Bintara Pembina Desa) serta dibantu oleh Perangkat Desa yang lainya, masih dalam melakukan tahap pengawasan (*Preventif*) belum sampai ke arah sanksinya baik admistrasi maupun yang lainya.

2) Faktor Sarana atau Fasilitas

 Yaitu karena masyarakatnya di suruh membuang sampah sendiri - sendiri ditempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa, disamping itu juga masih menunggu bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang berupa mobil pengangkut sampah.

3) Faktor Masyarakat

 Yaitu warga masyarakat setempa masiht kurang adanya kepedulian dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan yang ada dalam lingkungan hidup sekitarnya.

 4) Faktor Budaya

 Yaitu Faktor Budaya (kebiasan) yang masih melekat pada warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, masih memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu masih membuang sampah sembarangan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada warga masyarakat yang lain.

 Kesadaran hukum menjadi hal yang penting dalam penerapan / penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk atau masyarakat akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor keasadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, dimana semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum.

 Upaya sosialisasi dan / atau penyuluhan hukum yang diberikan oleh pemerintah Desa Wotan kepada masyarakat khususnya pada warga masyarakat yang berada di dukuh jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, agar harus tetap terus untuk dilakukan atau digalakkan supaya untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

**PENUTUP**

1. **SIMPULAN**

Berdaraskan uraian pada bab sebelumya, maka pada sub bab ini dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih sering membuang sampah sembarangan itu adalah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup yang ada, karena masih mempunyai budaya dan / atau kebiasan yang kurang baik serta karena kurangnya rasa kesadaran diri dalam hal menjaga kebersihan lingkungan hidup yang ada dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Penegakan Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemeritah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, apabila dilihat dari proses pembuatan hukumya sudah baik karena sudah melibatkan elemen masyarakat dan / atau lembaga masyarakat yang ada dalam Pemerintahan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Akan tetapi untuk Pelaksanaan penegakan hukumnya masih belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang mempengeruhinya diantaranya adalah sebagai berikut yaitu karena faktor penegakan hukum yaitu masih dalam tahap pengawasan (*Preventif*) dan belum ke arah sanksinya baik secara admistrasi maupun yang lainya, karena faktor sarana atau fasilitas yaitu masih menunggu bantuan dari pemerintah berupa mobil pengangkut sampah, karena faktor masyarakat yaitu masyarakatnya masih kurang adanya pengetahuan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan hidup setempat, dan karena faktor budaya yaitu masyarakatnya masih memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam melakukan pembuangan sampah.
3. **SARAN**

Berdasarkan permaslahan yang peneliti bahas dalam penelitian ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati khusunya bagi Pemerintah yang berada di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, harus tetap melalakukan penggalakan secara maksimal dalam melaksanakan sosialisasi dan atau / penyuluhan secara positif dan konsisten tentang pentinganya menjaga kebersihan lingkungan hidup khususnya pada warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, agar nantinya dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup pada lingkungan setempat.
2. Bagi para aparat penegak hukum yaitu Aparat Desa / Perangakat Desa khusunya Bapak Kepala Desa Wotan, Kepala Dukuh Jongso, Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) dan Babinsa ( Bintara Pembina Desa) Serta BPD (Badan Permusayaratan Desa) selaku Pengawas Desa, dalam melakukan penegakan hukum Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup di Desa Wotan khsusnya di Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ini. Peraturan Desa tersebut harus tetap untuk ditegakan sebagaimana mestinya dan tidak pandang bulu, dengan berpegangan sistem hukum yang didasarkan pada nilai - nilai filosofi yang berorentasi pada kebenaran, keadilan nilai sosial yang berorentasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat dan nilai yuridis yang bertumpu pada peratura perundang - undangan yang menjamin pada peraturan hukum dan / atau kesadaran hukum bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, “*Penegakan Hukum Lingkungan”*, PT. Alumni, Bandung, 2016.

Ani Purwati, “*Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik”*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Beni Ahmad Saebani, “*Sosiologi Hukum”*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Cecep Tri Wibowo dan Mitha Erlisya Pusphandani, “*Kesehatan Lingkungan Dan K3.”* Nuha Medika, Yogyakarta, 2018.

Deni Bram, “*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP), Jakarta Selatan, 2011.

Depertemen Pendidikan Nasional,*“Kamus Bahasa Indonesia”* Tim Pusat Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

Damaya, “*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang - Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa”,* Cetakan Pertama, Tim Redaksi Laksana, Jakarta, 2019.

Indang Dewata dan Yun Hedri Danhas, “ *Pencemaran Lingkungan*,” PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Lawrence M. Friedman, “ *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Moh. Fadli, et.all*, “Hukum dan Kebijakan Lingkungan,* UB Press, Malang*,* 2016.

Muhammad Taufik, “*Aspek - Aspek Hukum Lingkungan”*, PT. Indeks, Jakarta, 2010.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Tim Mataram University Press, Mataram, 2020.

Satjipto Rahardjo, “ *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* ”, Genta Publishing, yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, “ *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum“*, Cetakan ke 17, PT. Raja Grafindo, Depok, 2021.

-------------------,“ *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”*, CV. Rajawali, Jakarta, 2019.

Sukanda Husin, “ *Penegakan Hukum Lingkungan*,” Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Zulkarnaen, “ *Dinamika Sejarah Hukum Filosofi Hingga Profesi Hukum*’’, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018.

**Jurnal :**

 Agus Irawan “ *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten / Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia”*, Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1 No. 2 Desember 2018, Universitas Adiwangsa, Jambi.

 Atang Hermawan Usman, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia”*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No. 1 Februar 2014, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

 Jumarsa, *et all*, “ *Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Gampong Cot Siren Samalanga Kabupaten Bireuen”*, Jurnal Biologi Education. Volume 8 No. 2 Oktober 2016, Universitas Serambi Mekkah.

Rosita Candrakirana, “ *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”*, Jurnal Yustisia.Vol. 4 No. 3 September - Desember 2015, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sri Sulistyawati,“*Penegakan Hukum Lingkungan (Environtmen Enforcement) Berbasis Nilai Karakter”,* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washiyah.

 Utang Rasyidin, “ *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”*, Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 4 No. 1 September 2019, Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung djati, Bandung.

 Vivi Ariyanti, “ *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2 Desember 2019, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.

Warsito, “*Menumbhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi”*, Jurnal Bedah Hukum Vol. 3 No. 1 Agustus 2017, Universitas Padjadjaran.

 Wicipto Setiadi, “*Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhan Cement Supremacy Of law)”* Jurnal Rechtsvinding Kepala Badan Pembinanan Hukum Nasional (BPHN), volume 1 Januaril - April 2012, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

 **Peraturan Perundang - undangan :**

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

 Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Desa Wotan Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan Lingkungan Hidup.

1. Beni Ahmad Saebani, “*Sosiologi Hukum”*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wicipto Setiadi, “*Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhan Cement Supremacy Of law)”* Jurnal Rechtsvinding Kepala Badan Pembinanan Hukum Nasional (BPHN), Volume 1 Januari - April 2012, Kementrian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, “*Penegakan Hukum Lingkungan”*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Deni Bram, “*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP), Jakarta Selatan, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indang Dewata dan Yun Hedri Danhas, “ *Pencemaran Lingkungan*,” PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”,* Tim Pusat Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1649. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moh. Fadli, et.all*,“Hukum Dan Kebijakan Lingkungan”,* UB Press, Malang*,* 2016, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Sulistyawati, “*Penegakan Hukum Lingkungan (Environtmen Enforcement) Berbasis Nilai Karakter”,* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washiyah, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zulkarnaen*, “Dinamika Sejarah hukum Filosofi Hingga Profesi hukum,”*CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm.160. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Rahardjo, “ *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* ”, Genta Publishing, yogyakarta, 2010, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, “ *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum “*, Cetakan ke 17, PT. Raja Grafindo, Depok, 2021, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rosita Candrakirana, “ *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”*, Jurnal Yustisia.Vol. 4 No. 3 September - Desember 2015, Univesitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 581. [↑](#footnote-ref-12)
13. Vivi Ariyanti, “ *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*, Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2 Desember 2019, Fakultas syaria’ah IAIN Purwokerto, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-13)
14. Satjipto Rahardjo, *op. cit*, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lawrence M. Friedman, “ *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 15 - 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Damaya, “*Himpunan Lengkap Peraturan Perundang - Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa”,* Cetakan Pertama, Tim Redaksi Laksana, Jakarta, 2019, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-16)
17. Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Indonesia”,* *op.cit*, hlm. 187. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jumarsa, et all, “ *Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Gampong Cot Siren Samalanga Kabupaten Bireuen,* “ Jurnal Biologi Education. Volume 8 No. 2 Oktober 2016, Universitas Serambi Mekkah, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Taufik, “*Aspek - Aspek Hukum Lingkungan”*, PT. Indeks, Jakarta, 2010, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-19)
20. Cecep Tri Wibowo dan Mitha Erlisya Pusphandani, *Kesehatan Lingkungan Dan K3, “* Nuha Medika, Yogyakarta, 2018., hlm. 76. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Tim Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ani Purwati, “*Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik”*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kepala Desa Wotan dan Kepala Dukuh Jongso, Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2021 diDesa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. [↑](#footnote-ref-23)
24. Atang Hermawan Usman, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Indonesia”*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No. 1 Februari 2014, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mohammad Taufiq Makarao, “*Aspek - Aspek Hukum Lingkungan,*” PT. Indek, Jakarta, 2011, hlm. 169. [↑](#footnote-ref-25)
26. Warsito, “*Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Perguruan Tinggi”*, Jurnal Bedah Hukum Vol. 3 No. 1 Agustus 2017, Universitas Padjadjaran, hlm. 11-13. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kepala Dukuh Jongso,Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021 di Kediaman Bp Kepala Dukuh Jongso Desa wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sukanda Husin, “ *Penegakan Hukum Lingkungan*,” Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 18 - 19. [↑](#footnote-ref-28)